

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia sudah terjalin sejak lama. Hubungan Indonesia dengan Malaysia ini bisa dikatakan sangat dekat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : pertama, karena sebagian besar rakyat Indonesia beragama islam, begitu pula dengan masyarakat di Malaysia. Kedua, letak geografis yang sangat dekat sehingga akan sangat mudah bila melakukan hubungan luar negeri diantara keduanya. Dan yang ketiga adalah karena penduduk asli Indonesia dengan penduduk asli Malaysia merupakan satu rumpun yaitu rumpun melayu.

Berjalannya suatu hubungan luar negeri diantara keduanya pasti akan ada sebuah permasalahan yang akan timbul diantara mereka, mulai dari masalah perbatasan, tenaga kerja illegal, sampai kepada pelanggaran pelanggaran HAM. Baru-baru ini hubungan antara Indonesia dengan Malaysia mulai memanas, hal itu disebabkan karena adanya oknum polisi yang melakukan penganiayaan berat terhadap seorang wasit Indonesia yang bisa dikatakan seorang delegasi olah raga yang dikirim oleh Indonesia untuk mewakili Indonesia dan membawa nama baik Indonesia.

Seorang delegasi suatu negara yang seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah Malaysia tetapi malah sebaliknya mendapatkan perlakuan yang tidak berprrikemanusiaan. Dengan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi di Malaysia, maka dalam hal ini Indonesia

sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh merasa tidak dapat menerima perlakuan tersebut, hal ini dapat kita lihat dari memanasnya politik dalam negeri Indonesia yang diakibatkan oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat strategis salah satunya di kedutaan besar Malaysia untuk Indonesia sebagai bentuk penentangan terhadap Malaysia atas kasus penganiayaan oleh sejumlah oknum polisi negaranya.

Adapun aksi yang dilakukan para demonstran tersebut berupa : pengusungan spanduk yang bertuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Malaysia, melakukan sweeping ke berbagai tempat yang terdapat warga Malaysia, yang menyebabkan pulangnya atlet-atlet Malaysia yang sedang bertanding di Indonesia, dan menyerukan untuk melakukan aksi boikot produk-produk Malaysia, dll.

Namun, banyaknya tuntutan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Indonesia untuk bersikap keras (memutuskan hubungan diplomatic) dengan Malaysia ternyata tidak ditanggapi dengan seksama oleh pemerintah, hal inilah yang mendorong saya sebagai penulis menggunakan judul "Sikap Departemen luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Ketegangan-ketegangan Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Malaysia" untuk meneliti factor/ aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Malaysia.

## **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan utama dari penulisan dengan judul “Sikap Departemen Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Ketegangan Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Tahun 2005-2007” ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesa.
2. Penulisan ini juga bertujuan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan.
3. Sebagai upaya untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Berbicara hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan Malaysia tentu saja banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dimana hal tersebut akan mewarnai hubungan bilateral diantara kedua negara tersebut. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara yang sangat dekat dengan Malaysia, bahkan Indonesia dengan Malaysia merupakan satu rumpun yaitu termasuk ke dalam rumpun melayu, hal itu bisa dilihat dari persamaan ciri fisik.

Adapun permasalahan yang sering muncul diantara kedua negara tersebut adalah tentang masalah keimigrasian tenaga kerja Indonesia di Malaysia, beberapa kasus yang paling sering menonjol adalah tentang perampasan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, mulai dari pelecehan

seksual sampai kepada pemukulan dan pembunuhan, masalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, pengambil alihan pulau ambalat oleh Malaysia, dan bahkan baru-baru ini ada seorang tamu Indonesia yang datang resmi untuk sebuah kejuaraan tingkat Asia dipukuli hingga luka parah sungguh penghinaan yang amat serius. Penghinaan terhadap siapa pun sang tamu itu berasal. Dalam hal ini penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak bisa menerima perlakuan brutal para polisi Malaysia. Pengeroyokan terhadap seorang wasit yang menjadi duta bangsa merupakan pelecehan yang amat serius. Pemukulan terhadap wasit karate Indonesia kian membuktikan Malaysia, negara tetangga satu rumpun itu, memang makin tidak bersahabat.<sup>1</sup>

Dan pula, hingga kini bangsa serumpun itu masih menyebut rakyat kita dengan sebutan berkonotasi merendahkan, yaitu *Indon*. Bukan Indonesia. Baik secara lisan maupun tulisan. Adalah fakta bahwa Malaysia merasa dirinya sekarang lebih superior dalam banyak hal. Ekonominya lebih sehat, rakyatnya lebih sejahtera, negaranya lebih bersih dalam hal korupsi, dan lebih tegas membasmi narkoba. Bahkan, Indonesia kalah di Mahkamah Internasional sehingga dua pulau milik negeri ini dicaplok dengan sah oleh Malaysia. Dengan seluruh keunggulan itu, ditambah kenyataan begitu banyak rakyat kita yang mencari makan di negeri jiran itu, menambah lengkap penilaian bahwa Indonesia memang rendah di mata Malaysia. Eksesnya adalah perlakuan hina dan semaunya menggunakan kekerasan fisik terhadap anak bangsa ini.

Rupanya Malaysia tengah mengembangkan kultur main pukul. Kultur agresif terhadap Indonesia. Kita masih ingat konflik Blok Ambalat dua tahun lalu. Kekesalan kita juga muncul karena didahului pemukulan oleh tentara Malaysia terhadap beberapa pekerja Indonesia. Tidak hanya aparat yang kerap main kekerasan terhadap warga Indonesia. Warga sipil Malaysia juga setali tiga uang. Berkali-kali para perempuan pekerja di sektor domestik juga mengalami kekerasan yang mengenaskan dari para majikan. Sudah tak terbilang kasus kekerasan yang dilakukan majikan terhadap warga Indonesia.

Sebut saja kasus Nirmala Bonat pada 2004. Pekerja domestik berusia belia asal NTT itu mengalami siksaan yang cukup lama: disetrika, dipukuli, dan disiram air panas. Hal yang kurang lebih sama juga dialami Ceriyati. Perempuan asal Brebes, Jawa Tengah, itu bergelantungan di lantai 15 sebuah apartemen Kuala Lumpur hendak melarikan diri, Juni lalu. Ia tak tahan siksaan tak terperikan dari sang majikan. Yang sungguh di luar dugaan, sikap warga dan aparat Malaysia ternyata setali tiga uang. Malaysia begitu kompak dalam hal 'kebijakan kekerasan' terhadap warga Indonesia. Hingga kini, misalnya, kelanjutan kasus penyiksaan terhadap Ceriyati tidak jelas. Sebagai bangsa, kita sungguh terluka oleh sikap Malaysia yang tidak bersahabat itu. Bangsa ini memang tengah mengalami ujian dalam banyak hal. Kita memang belum seberuntung Malaysia yang pertumbuhan ekonominya pesat dan warganya lebih makmur.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Tempo*, 8 September 2007

Tetapi, sangatlah menyakitkan jika kemakmuran ekonomi menjadi dasar arogansi terhadap bangsa lain. Dan, yang disebut 'bangsa lain' itu adalah Indonesia, negara tetangga yang masih satu rumpun. Malaysia harus ingat, betapa pun Indonesia kini mengalami banyak kekurangan, satu hal yang tidak pernah luntur adalah harga diri. Oleh karena itu, dalam kasus pemukulan terhadap Donald Pieter Luther Kolopita, apa pun pendekatannya dari pihak Malaysia secara diplomatik, pemerintah tidak boleh lembek. Itu kasus yang kesekian kali. Hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada penyelesaian yang tidak menghormati asas keadilan. Apa yang dilakukan telah mengusik milik kita yang paling berharga, yaitu harga diri bangsa.

Ketidakjelasan hukum yang dirasakan oleh Indonesia selama ini memaksa masyarakat Indonesia melakukan berbagai aksi demonstrasi besar-besaran mengutuk perlakuan oknum polisi yang sewenang-wenang. Aksi demonstrasi dilakukan hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia yang mempunyai letak strategis. Para demonstrasi tersebut menuntut agar Indonesia meninjau ulang hubungan diplomatic dengan Malaysia, tidak hanya itu saja aksi demonstrasi pun berlanjut dengan melakukan sweeping terhadap warga Malaysia yang berada di Indonesia yang berdampak pada pulangnya beberapa atlet Malaysia yang sedang melakukan kegiatan turnamen.<sup>3</sup>

Demonstrasi pun berlanjut kearah yang lebih ekstrem ketika pernyataan Menlu Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sama sekali tak ada rasa penyesalan

---

<sup>3</sup> *Surya*, Sabtu 8 September 2007

apalagi meminta maaf atas kejadian memalukan yang dilakukan polisi Malaysia yang melakukan pemukulan secara keroyokan dan sadis terhadap seorang wasit senior cabang olahraga karate dari Indonesia. Oleh karena itu, tepat saatnya menakar kembali hubungan dengan Malaysia. Harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencermati, mengevaluasi, mengalkulasi, bahkan meninjau kembali kualitas hubungan kita dengan negeri jiran itu. Posisi Indonesia *vis a vis* Malaysia harus ditata ulang untuk meraih martabat dan kedudukan sederajat, sebaik-baiknya, dan semulia-mulianya.

Kasus penganiayaan wasit karate Indonesia adalah momentum yang tepat untuk melakukan itu semua. Sudah saatnya untuk membuat Malaysia berhenti memperlakukan Indonesia dengan arogansi. Sudah saatnya membuat Malaysia menghapus kata *Indon*. Sudah saatnya membuat Malaysia menghormati harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dan negara, sehingga ungkapan 'Ganyang Malaysia' tidak lagi muncul dalam kamus diplomatik Indonesia-Malaysia.<sup>4</sup>

Peristiwa pemukulan itu sangat disesalkan. Apalagi kedua negara memiliki banyak persamaan dan serumpun. Artinya, nilai-nilai budaya di antara kedua negara memiliki kedekatan makna. Budaya kita tidak mengenal tindak kekerasan, apalagi dilakukan dengan alasan yang tidak jelas. Karena itu, jika ada tindak kekerasan, maka itu adalah pembunuhan terhadap hakikat kebudayaan. Kejelian dan keseriusan dalam menangani kasus ini menjadi ujian bagi harga diri bangsa kita. Sebab harga diri bangsa ini amat bergantung

---

<sup>4</sup> *ibid*



ketiga penarikan duta besar RI di Malaysia, ketiga pengusiran Duta besar Malaysia di Indonesia, keempat pemutusan hubungan diplomatic, dan kelima adalah perang. Perang adalah jalan terakhir dari suatu diplomasi.

Dalam kasus ini, Indonesia hanya sampai kepada pemanggilan duta besar Malaysia di Indonesia untuk mendengarkan penjelasan apa yang sedang terjadi dan menyelesaikan permasalahan dengan jalan diplomasi dan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat Indonesia yang menuntut untuk memutuskan hubunganm diplomatic dengan Malaysia.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka muncul permasalahan yang ingin dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu :

*Mengapa departemen luar negeri Indonesia tidak bersikap keras terhadap Malaysia padahal masyarakat Indonesia bersikap keras terhadap Malaysia ?*

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori yang dipandang sesuai untuk menganalisa kasus dengan menggunakan teori Sistem Politik oleh David Easton, teori Model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison, dan konsep kepentingan nasional.

### a) Teori Sistem Politik Oleh David Easton

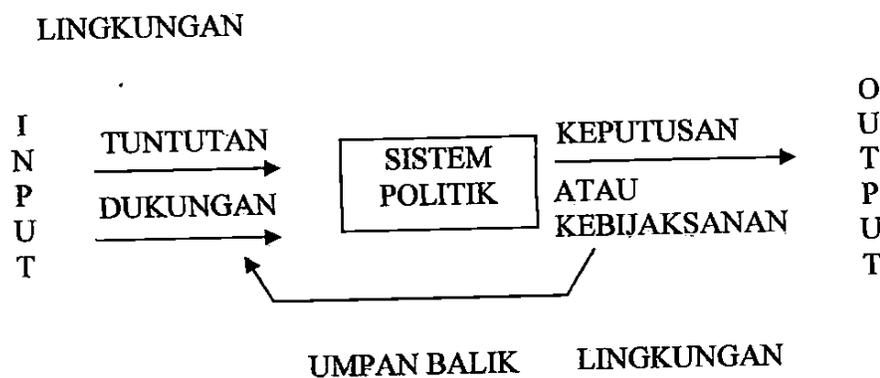
Profesor Easton mengusulkan suatu metode untuk menganalisa berbagai jenis sistem politik. Yaitu dengan menelaah sistem-sistem politik berdasar ciri-ciri dasar seperti: (1) unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu, (2) "input" dan "output" dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat (output) dan proses pembuatan keputusan (input) di dalam sistem tersebut, (3) jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut, dan (4) tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Dalam menganalisa berbagai komponen ini Profesor Easton menawarkan kepada kita suatu metode untuk memahami dan memperbandingkan berbagai sistem politik.<sup>6</sup>

Dalam buku *The Political System*, bahwa sangat penting untuk menerapkan asumsi implicit sebagai pangkal tolak berpikir dalam melaksanakan penelitian, dan untuk memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan. Sifat saling berkaitan atau ikatan-ikatan sistemis dari kegiatan-kegiatan ini berasal dari fakta bahwa semua kegiatan itu mempengaruhi cara pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan otoritatif itu dalam masyarakat. Studi politik berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat.

---

<sup>6</sup> Mohtar Mas'ood, Colin Mac Andrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000. Hal. 4

Apabila kita berpegang pada anggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat bahwa yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan di mana sistem itu berada. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal: input - sistem atau proses politik - output. Untuk lebih jelasnya, hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut.<sup>7</sup>



Sebagai aplikasi dari teori sistem politik ini adalah bahwa banyaknya berbagai kasus yang terjadi antara Indonesia dengan negara Malaysia yang mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia terhadap Malaysia membuat politik dalam negeri Indonesia menjadi panas. Adapun bentuk protes dari aksi masyarakat Indonesia adalah dengan demonstrasi di tempat-tempat strategis, menyerukan yel-yel ganyang

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 5

Malaysia, melakukan sweeping terhadap warga Malaysia yang berada di Indonesia, menyerukan aksi boikot terhadap produk Malaysia, dan yang lebih parah lagi yaitu melakukan pembakaran bendera Malaysia.

Hal diatas merupakan sesuatu yang wajar karena masyarakat Indonesia menilai bahwa hubungan bilateral yang terjadi diantara dua negara ini dianggap hanya mendatangkan kerugian saja bagi Indonesia, untuk itu masyarakat menuntut terhadap pemerintah Indonesia agar melakukan pemutusan hubungan diplomatic dengan Malaysia.

Dalam menanggapi tuntutan yang masuk dari masyarakat (input), pemerintah Indonesia tidak bisa langsung saja menuruti sebagaimana keinginan atau tuntutan masyarakat untuk memutuskan hubungan diplomatic dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia sebelum mengambil suatu keputusan (output) harus melakukan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, dimana Indonesia mempunyai banyak sekali kepentingan di Malaysia, mulai dari TKI yang bekerja di Malaysia, kegiatan perdagangan Indonesia-Malaysia (Ekspor-impor), dan kerjasama-kerjasama lainnya yang terjalin diantara kedua negara yang saling menguntungkan.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa apabila Indonesia bersikap keras terhadap Malaysia/melakukan pemutusan hubungan diplomatic dengan Malaysia maka keuntungan yang akan diterima oleh Indonesia yaitu pemerintah akan lebih dipercaya oleh masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa aspirasinya dapat terealisasikan dengan baik namun

kerugian yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia lebih banyak dibandingkan keuntungannya dimana Indonesia akan kehilangan devisa negara yang setiap tahun mengalir dari TKI di Malaysia, kehilangan pendapatan dari kegiatan perdagangan Indonesia dengan Malaysia, meningkatnya pengangguran akibat TKI di Malaysia di deportasi, hilangnya investasi Malaysia di Indonesia, dll.

Dengan pertimbangan-pertimbangan untung dan rugi yang nantinya akan diterima oleh negara Indonesia maka pemerintah Indonesia mengambil kebijaksanaan untuk tidak bersikap keras terhadap Malaysia atau tidak memutuskan hubungan diplomatic dengan Malaysia (output) karena dampak yang akan dirasakan oleh negara Indonesia dari pengambilan kebijaksanaan/keputusan bersifat luas maka pemerintah dirasa perlu untuk mengambil keputusan yang dianggap rasional.

**b) Model Pembuatan keputusan oleh Graham T. Allison**

Graham T. Allison memberikan gambaran mengenai proses pembuatan keputusan. Model yang digunakan adalah Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik. Dalam kasus ini, penulis akan menggunakan Model Aktor Rasional.

Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan. Aktor rasional dipandang sebagai orang yang rasional dalam menjelaskan secara rinci tujuan-tujuan mereka, pilihan-pilihan yang tersedia, dan konsekuensi-

konsekuensi yang mungkin akan timbul dari tiap pilihan alternatif sebelum membuat keputusan.

Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintah dianalogkan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual untuk menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Maka, unit analisis dalam pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis tentang politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa itu sendiri. Berbagai alternative-alternatif kebijaksanaan yang biasanya dijalankan oleh pemerintah harus memperhitungkan untung dan ruginya. Seorang pengambil kebijakan harus mengambil keputusan strategis tersebut dan mampu mempelajarinya kembali, mengingat keputusan yang diambil merupakan keputusan untuk pemerintahannya.

Para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif ini menggunakan kriteria "Optimalisasi Hasil". Para pembuat keputusan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya melalui beberapa informasi yang diperolehnya dan beberapa sumber yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mochtar Mas'ud, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin Dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Dengan demikian, maka para pembuat keputusan tersebut mampu menggunakan rasionalitasnya untuk pengambilan keputusan. Dan keputusan yang diambil cenderung menyangkut keputusan luar negeri yang dibuat secara rasional. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, maka pembuat keputusan harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dalam melakukan tindakan ini.

Untuk menentukan politik luar negeri, dalam mempelajari proses pembuatan keputusan politik luar negeri, harus diketahui siapa yang ikut bermain, yang mempengaruhi berbagai persepsi pembuatan keputusan, dan bagaimana cara mengagregasikan kepentingan tersebut sehingga menghasilkan suatu keputusan pemerintah yang baik. Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasional yang dikandungnya. Para pembuat keputusan dianggap rasional dan kita umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Karena itulah model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Kebijakan yang diambil/politik luar negeri yang dilaksanakan merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa tersebut yang pasti menguntungkan tujuan/kepentingan nasionalnya.

Sebagai aplikasi pada penulisan skripsi ini, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan teori Graham T. Allison Model Aktor Rasional, proses penyelesaian dalam setiap kasus atau masalah antara Indonesia dengan Malaysia mampu diselesaikan secara damai dengan

mengedepankan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai penjelasannya dapat kita lihat uraian berikut ini : masih segar dalam ingatan kita semua ketika Malaysia mengklaim bahwa pulau Ambalat merupakan bagian dari Malaysia mengakibatkan dampak yang begitu hebat terhadap Indonesia karena Indonesia sendiri merasa bahwa pulau itu merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia, hal ini mengakibatkan ketegangan diantara kedua negara tersebut.

Selain itu banyak kasus lagi yang sering terjadi diantara kedua negara tersebut, misalnya masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan sudah merupakan cerita yang besar bahwa banyak tenaga kerja Indonesia yang mengalami tindakan-tindakan yang tidak berprilaku manusiawi di Malaysia, mulai dari gaji yang tidak dibayar oleh majikannya, penganiayaan, pelecehan seksual sampai kepada pembunuhan. Dan yang baru-baru ini terjadi kasus penganiayaan wasit karate Indonesia yang dilakukan oleh oknum polisi Malaysia di negara Malaysia. Seorang polisi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat namun bertindak diluar prilaku manusiawi. Hal ini membuat masyarakat Indonesia merasa tidak dihargai dan dilecehkan sebagai bangsa yang berdaulat sehingga menimbulkan dampak yang begitu besar didalam negeri Indonesia yang membuat menegangnya hubungan diantara kedua negara.

Dalam setiap kasus yang terjadi diantara kedua negara ini, Indonesia tidak dapat bersikap keras terhadap Malaysia yaitu tidak

melakukan pemutusan hubungan diplomatik tetapi masih saja menjaga hubungan diantara keduanya, hal itu dilakukan oleh Indonesia karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan kepentingan Indonesia di Malaysia, misalnya didalam bidang ekonomi, kegiatan perdagangan ekspor impor diantara kedua negara ini kerap kali berlangsung, belum lagi penyerapan tenaga kerja Indonesia yang begitu banyak oleh negara Malaysia yang mampu membuat dampak positif yaitu dengan berkurangnya pengangguran di Indonesia, selain itu banyak kerjasama-kerjasama baik dibidang politik, militer, dan budaya diantara kedua negara ini, salah satunya adalah kerjasama militer dimana Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dalam mengamankan wilayah selat malaka yang merupakan lalulintas perairan laut yang paling padat dimana sebelum adanya kerjasama diantara kedua negara ini banyak terjadi perompakan-perompakan sampai-sampai perairan ini dikenal sebagai perairan paling berbahaya, namun setelah dibentuk kerjasama militer diantara kedua negara ini, mampu menghasilkan perubahan yang positif yaitu dengan menurunnya kasus perompakan yang terjadi di perairan selat malaka.

Dengan terjadinya banyak kasus antara negara Indonesia dengan negara Malaysia jangan sampai mempengaruhi stabilitas hubungan diantara kedua negara ini. Sebagai sebuah negara di lingkungan internasional, Indonesia dengan malaysia secara geografis sangat berdekatan dan saling mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup

berdampingan dan berhadapan satu sama lain.<sup>9</sup> Untuk itu, Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai banyak kepentingan di negara Malaysia harus mampu menentukan kebijaksanaan atau keputusan politik luar negeri yang dianggap rasional dalam menyelesaikan kasus yang memicu ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia.

**c) Konsep Kepentingan Nasional**

Untuk memperjelas analisa permasalahan diatas dipergunakan konsep kepentingan nasional. Konsep ini dipergunakan karena memiliki sejumlah kemampuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan maupun meramalkan perilaku internasional suatu negara. Dengan kata lain dasar perilaku luar negeri suatu negara dapat diketahui melalui kepentingan negara tersebut. dan sebagai bahan acuan untuk menganalisa konsep kepentingan nasional suatu negara, seperti yang telah diutarakan oleh Paul Seabury bahwa :

“Ide kepentingan nasioanal mengacu kepada sejumlah perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan nasional suatu bangsa, yang harus ditemukan sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan luar negeri negara tersebut. Dalam hal ini, kata normative dapat digunakan . sedangkan kepentingan nasional yang lebih mengacu kepada hal yang lebih deskriptif (real) adalah sejumlah tujuan nasional suatu bangsa yang akan diraih dalam jangka waktu tertentu”.<sup>10</sup>

Bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki sejumlah kebutuhan dan tujuan yang sebagian

<sup>9</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Februari 2005. Hal : 2

<sup>10</sup> Paul seabury dalam K.J Holsti, *International politics A Framework for Analysis*, prestice Hall of India, New Delhi, 1978, hal 139

besar dapat diperoleh melalui pengadaan hubungan serta penyebaran pengaruh terhadap negara lain. Hubungan luar negeri tersebut ditujukan untuk memecahkan berbagai persoalan baik yang berhubungan dengan masalah dalam negeri maupun luar negeri. Seperti yang telah didefinisikan dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan politik luar negeri Indonesia merupakan perwujudan dari tujuan negara, yaitu :

”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Adapun dalam sila pancasila yaitu sila kedua dan sila kelima, mewajibkan Indonesia untuk ikut memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia dan dalam rangka itu memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan Garis-garis Besar haluan Negara 1988, politik luar negeri bebas aktif diusahakan untuk meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangan terciptanya perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera, terutama diabdikan kepada kepentingan nasional.

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap kasus-kasus yang terjadi dengan Malaysia ditujukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai dan bersifat adil, karena Indonesia mempunyai banyak kepentingan di Malaysia. Adapun kepentingan nasional Indonesia diidentifikasi dengan kesejahteraan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Malaysia

merupakan negara penyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran di Indonesia.

## **F. Hipotesa**

Dari latar belakang permasalahan dan kerangka dasar teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan hipotesa :

1. Departemen luar negeri Indonesia tidak bersikap keras terhadap Malaysia yang telah menghina Indonesia karena memiliki pertimbangan rasional dan pertimbangan untung dan rugi serta dampak positif dan dampak negatifnya
2. Departemen Luar Negeri Indonesia tidak bersikap keras terhadap Malaysia atau tidak melakukan pemutusan hubungan diplomatic disebabkan karena banyaknya kepentingan Indonesia di Malaysia

## **G. Jangkauan Penulisan**

Penulis membatasi jangkauan penulisan *Sikap Departemen Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan Ketegangan Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Tahun 2005-2007* dengan menggunakan periode waktu yaitu pada tahun 2005-tahun 2007 dan juga menggunakan unit analisa kelompok yaitu kelompok kasus, yang terdiri dari kasus ambalat, perbatasan, pembajakan kesenian dan budaya Indonesia, tenaga kerja dan penganiayaan

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Metodologi penelitian ini merupakan suatu cara yang utama dalam melakukan penelitian guna mencapai tujuan penelitian yaitu untuk memberikan paparan menyeluruh tentang sikap Departemen Luar Negeri Indonesia dalam menyelesaikan ketegangan-ketegangan dengan Malaysia tahun 2005-2007. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penulisan yang terbatas mengungkapkan suatu masalah atau fenomena yang terjadi di negara yang menjadi obyek penelitian, dengan data-data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan, yaitu melalui : buku-buku, jurnal, dan berita-berita dari media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji yang sifatnya relevan, selain itu juga dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara komparasi, dimana teknik ini menganalisa data yang diperoleh dengan mengkomparasikan atau membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Dengan demikian dapat tersusun sumber-sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Bab ini terdiri dari pendahuluan, yaitu alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

Bab II, Bab ini membahas mengenai kasus-kasus yang mampu menimbulkan ketegangan hubungan bilateral luar negeri Indonesia dengan Malaysia.

Bab III, Bab ini membahas tentang reaksi masyarakat Indonesia terhadap Malaysia dan tuntutan masyarakat.

Bab IV, Bab ini membahas tentang sikap Departemen Luar Negeri Indonesia dalam menyelesaikan ketegangan hubungan Indonesia dengan Malaysia dan politik luar negeri Indonesia.

Bab V, Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh bab-bab sebelumnya dan merupakan pembahasan terakhir atau penutup dari penulisan skripsi ini